

ANALISIS PERTUMBUHAN BELANJA DAN KESERASIAN BELANJA  
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN  
2018-2020

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

YOLA EKA SAFITRI

19133096

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

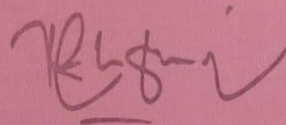
**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERTUMBUHAN BELANJA DAN KESERASIAN BELANJA  
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Yola Eka Safitri  
NIM : 19133096  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

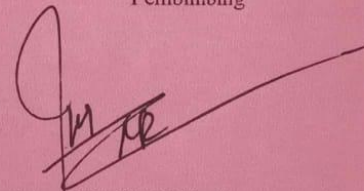
Padang, 23 Juni 2022

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA  
NIP.198008092010121003

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Dr. Erino NR, SE, M.Si, Ak.  
NIP.195807181989031002

LEMBAR PENGESAHAN

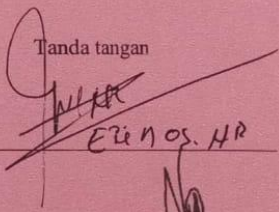
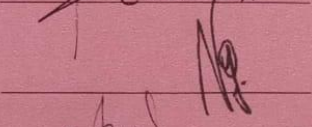
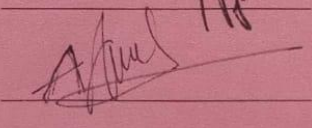
ANALISIS PERTUMBUHAN BELANJA DAN KESERASIAN BELANJA  
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN  
2018-2020

Nama : Yola Eka Safitri  
NIM : 19133096  
Program Studi : Akuntansi (D3)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 9 Agustus 2022

Tim Penguji

- | Nama                                      | Tanda tangan   |
|---|--|
| 1. Dr. Erinos NR. M.Si, Ak (Ketua)        |  |
| 2. Vita Fitria Sari, S.E, M.Si. (Anggota) |  |
| 3. Ade Elsa Betavia, SE, M.Si (Anggota)   |  |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yola Eka Safitri  
Tahun masuk/NIM : 2019 / 19133096  
Tempat/Tgl. lahir : Bukittinggi / 12 Mei 2000  
Program studi : D3 Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Badorai Indah No.73 Jorong Limo Kampuang Nagari  
Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam, Prov.Sumatera  
Barat.  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertumbuhan Belanja Dan Keresasian Belanja  
Pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola  
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bukittinggi  
Tahun 2018-2020.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 6 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Yola Eka Safitri  
NIM 19133096

## ABSTRAK

**Yola eka safitri : Analisis Pertumbuhan Belanja Dan Keserasian Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020.**

**Pembimbing : Dr. Erinoss, S.E., M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi belanja, keserasian belanja serta tingkat pertumbuhan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018-2020, persentase realisasi belanja terhadap anggaran belum mencapai angka yang maksimal setiap tahunnya. Subjek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi dan objek penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 - 2020, karena LRA yang dipublikasikan pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah.

Analisis yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu analisis Efisiensi, analisis Keserasian serta analisis Pertumbuhan yang digunakan untuk menilai berapa tingkat efisiensi serta pertumbuhan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 – 2020.

Metode yang dipakai untuk mendapatkan hasil dari tugas akhir ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, metode ini berguna untuk menjelaskan hasil yang didapat berdasarkan data kuantitatif berupa LRA Kabupaten Tanah datar, sehingga hasil analisis dapat diketahui setelah melihat data yang ada.

Realisasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dikategorikan cukup efisien, hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 88,36% pada tahun 2018, 86,23% pada tahun 2019, dan 90,06% di tahun 2020. Keserasian belanja secara umum diketahui sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dan sisanya dialokasikan untuk belanja modal. Rata-rata belanja operasi selama tahun 2018 hingga 2020 yaitu sebesar 99,03% dan Belanja Modal sebesar 0,96 %. Pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan mengalami penurunan, hal ini karena belanja pegawai yang persentasenya cukup tinggi dari belanja keseluruhan yang mengalami kenaikan atau penurunan, maka berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan belanja.

***Kata kunci ; Pertumbuhan Belanja, Laporan Realisasi Anggaran, Belanja***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi berkat, rahmat, dan hidayah serta pertolongan kepada penulis sehingga akhirnya Tugas Akhir ini dapat terealisasikan dengan judul **“ANALISIS PERTUMBUHAN BELANJA DAN KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018-2020”**. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi akhlakul karimah bagi seluruh muslim di penjuru dunia. Tugas akhir ini merupakan suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapat bimbingan, dukungan, maupun bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang dihadapi.
2. Teristimewa kepad kedua orang tua, Ayahanda Syafril, Ibunda Zuriyati dan adik Feli Safitri, serta keluarga besar yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi.
5. Ibu Dewi Pebriyani, S.E, M.Si selaku pembimbing akademik dan Bapak/Ibuk dosen serta staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Akuntansi FE UNP

yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama di perkuliahan.

6. Selaku dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini
7. Teman seperjuangan yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini Faradilla Azhari dan Husna Nadia Putri.
8. Terima kasih kepada M. Rizki yang telah memberikan motivasi, semangat serta selalu ada untuk penulis.
9. Teman semasa kuliah Winti Febrina, Novia Sandra, Windy Novella Sari, Rahmadina, Cindy Monika
10. Semua teman-teman seperjuangan khusus DIII Akuntansi 2019 yang memberikan semangat kepada penulis.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 6 Juli 2022

Yola Eka Safitri

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....	9
1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....	9
2. <i>Value For Money</i> .....	10
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	11
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran .....	11
2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran .....	14
3. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran .....	14
4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran .....	14
5. Struktur Laporan Realisasi Anggaran .....	15
C. Belanja .....	16
1. Pengertian belanja .....	16
2. Klasifikasi belanja .....	16
2. Analisis Laporan Belanja Anggaran .....	21
1. Analisis Efisiensi Belanja .....	21
2. Analisis Keserasian Belanja .....	22
3. Analisis Pertumbuhan Belanja .....	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian .....	25



B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
C. Rancangan Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Tahap Penelitian .....	26
3. Objek Penelitian .....	27
4. Jenis Data .....	27
5. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Instansi .....	29
1. Latar Belakang Pembentukan Badan Keuangan .....	29
2. Visi dan misi.....	30
3. Struktur Organisasi Instansi .....	31
B. Pembahasan .....	33
1. Analisis Efisiensi Belanja .....	33
2. Analisis Kecerahan Belanja .....	36
3. Analisis Pertumbuhan Belanja .....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Laporan Belanja BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018 – 2020 .....	4
Tabel 4.1 Kriteria Efisiensi Belanja.....	32
Tabel 4.2 Efisiensi Belanja BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018 – 2020 .....	33
Tabel 4.3 Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2018-2020.....	34
Tabel 4.4 Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2018-2020.....	36
Tabel 4.5 Pertumbuhan Belanja 2018-2020.....	38

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sistem kelola pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, dalam kurun waktu yang relatif singkat pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ayat 7 menyatakan asas otonomi daerah yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU No. 23 Tahun 2014). Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mengelola keuangan negara yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBN adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Undang-Undang No. 17 Tahun 2013). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintah, LRA adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan menyediakan informasi

mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh. LRA mencakup unsur yang terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan (Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006).

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah yang terealisasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan masyarakat (Indra : 2016).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kota Bukittinggi merupakan sebuah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang melakukan kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil - hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat

pembangunan yang tidak terlepas dari usaha keras bersama - sama antara pemerintah dan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Bukittinggi merupakan perangkat daerah yang berkewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, serta menyusun rencana strategis untuk menentukan arah pengembangan dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana strategis ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Padang 2014-2019 dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang tersedia. Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja daerah. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun laporan keuangan.

Berikut ini laporan anggaran dan realisasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1 Laporan Belanja BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018 - 2020.**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2018	115.959.908.141,00	102.463.183.881,00	13.496.724.260,00
2019	31.720.191.958,00	27.352.125.510,00	4.368.066.448,00
2020	22.285.702.869,00	20.071.521.383,00	2.214.181486,00

Sumber Data : Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat belanja Badan Keuangan untuk tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Perubahan ini belum menggambarkan bagaimana pertumbuhan belanja dan keserasian belanja serta efisiensi belanja pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dan masuk pada kategori manakah dalam analisis efisiensi. Alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja, dapat terlihat sejauh mana keefisienan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efisiensi anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk persentase.

Pengukuran pada tingkat pertumbuhan belanja untuk mengetahui perkembangan belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi, apakah kenaikan atau penurunan bersifat positif atau negatif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja seperti menilai rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana instansi memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio

efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja yang digunakan oleh instansi.

Belanja dalam LRA merupakan komponen penting yang mengandung perhatian publik, karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan semestinya, efisiensi, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan, setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam LRA analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan kedepan (Mahmudi 2010 : 155).

Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran. Komponen belanja yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah belanja yang terdiri dari belanja modal, belanja operasi, serta belanja tidak terduga.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti ingin mengetahui analisis pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi lebih komprehensif berdasarkan belanja daerah, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, “ **Analisis Pertumbuhan Belanja dan Keserasian**



## **Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat efisiensi belanja pada laporan realisasi anggaran di BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018-2020.
2. Bagaimana analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja pada laporan realisasi anggaran di BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018-2020.
3. Bagaimana analisis pertumbuhan belanja pada laporan realisasi anggaran di BPKAD Kota Bukittinggi tahun 2018-2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi belanja berdasarkan analisis efisiensi belanja pada LRA Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana persentase keserasian belanja berdasarkan analisis keserasian pada LRA Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan belanja berdasarkan analisis pertumbuhan belanja pada LRA Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

- a. Aplikasi dan pengembangan terhadap teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan untuk dapat diterapkan pada permasalahan dalam dunia nyata yang berkaitan dengan masalah manajemen keuangan dan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- b. Penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terhadap laporan belanja pada lingkup satuan kerja daerah pemerintahan Kota Padang.

### **2. Bagi Pembaca**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta bahan rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi kinerja keuangan pada tiap satuan kerja daerah pemerintahan Kota Bukittinggi.

### **3. Bagi Pemerintah**

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis efisiensi dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu untuk mengoptimalkan anggaran belanja secara ekonomis efisien dan efektif demi tercapainya pemerintah *good governance*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

- 1) Realisasi belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dikategorikan cukup efisien dalam anggaran, hal ini diketahui dari persentase efisiensinya sebesar 88,36% pada tahun 2018, 86,23% pada tahun 2019, dan 90,06% di tahun 2020.
- 2) Belanja Badan Keuangan Kota Bukittinggi dilihat dari keserasian belanja secara umum diketahui sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dan sisanya dialokasikan untuk belanja modal. Rata-rata belanja operasi selama tahun 2018 hingga 2020 yaitu sebesar 99,03% dan belanja modal sebesar 0,96 %, jelas bahwa sebagian besar dana belanja yang dianggarkan terealisasikan untuk kepentingan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.
- 3) Pertumbuhan belanja setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini karena anggaran belanja yang juga menurun pada tiap tahunnya maka berpengaruh besar terhadap pertumbuhan belanja.

#### **B. Saran**

- 1) Kebijakan dalam penggunaan anggaran belanja sebaiknya dilaksanakan dengan baik agar penyerapan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan lebih efisien.

- 2) Dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi agar anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan dengan baik.
- 3) Keserasian belanja pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu meningkatkan belanja modal, karena belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danial, H. K., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2014). Analisis Belanja Modal Dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2)
- Fitra, Halkadri. 2021. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Fe UNP
- Galento, Frengky. 2010. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Luwuk Banggai. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Muhamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Anggaran Perencanaan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Realisasi Anggaran